

***EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH (SIPD)
STUDI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG***

BUSINESS CASE REPORT

**Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S1 Akuntansi**

Program Studi S1 Akuntansi



Disusun oleh :

Givia Junia Wanda

NIM : 31401900071

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG 2023

HALAMAN PENGESAHAN

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI

PEMERINTAH DAERAH (SIPD)

STUDI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG

Disusun Oleh :

Givia Junia Wanda

31401900071

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat
diajukan ke hadapan sidang panitia ujian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang
Semarang, Februari 20223

Dosen Pembimbing Lapangan

Kepala Program Studi S1 Akuntansi


Dr. Chrisna Suhendi, SE., MBA., Ak., CA
NIK. 0603046301


Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA
NIK. 211403012

**HALAMAN PENGESAHAN
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
PEMERINTAH DAERAH (SIPD)**

Disusun Oleh

Givia Junia Wanda

31401900071

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 2 Maret 2022

Dosen Pembimbing Lapangan



Dr. Chrisna Suhendi, MBA., SE., Ak.Ca

NIDN: 0603046301

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji I



Dr. Dra. Hj. Winarsih, SE., M.Si, Ak,CA

NIK. 211415029

Dosen Penguji II



Rustam Hanafi, S.E., M.Sc., Ak., CA

NIK. 0612027401

Laporan business case report (MBKM) ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana S1 Akuntansi Tanggal 6 Maret 2023

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Provita Wijayanti SE., M.Si, Ak,CA

NIK. 211403012

PERNYATAAN LAPORAN MAGANG

NAMA : Givia Junia Wanda
NIM : 31401900071
PROGRAM STUDI : S1 AKUNTANSI
ANGKATAN : 2019
FAKULTAS : EKONOMI
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa usulan Laporan Magang berjudul “EFEKTIFITAS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG” ialah hasil karya sendiri, bukan dai plagiasi atau duplikasi dari hasil karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat pada laporan magang ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudia hari terbukti laporan magang ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima saksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 3 Januari 2023

Yang Menyatakan,



Givia Junia Wanda

KATA PENGANTAR

Assalamua 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Segala puji hanya milik Allah SWT karena berkat rahmatnya serta karunia- Nya penulis dapat menyelesaikan laporan magang MB-KM yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) STUDI PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA SEMARANG”** Laporan ini bertujuan sebagai persyaratan dalam meraih gelar sarjana S1 Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Laporan ini dibuat tentunya melibatkan berbagai pihak mulai dari pelaksanaan magang sampai selesai, kendala demi kendala dapat diselesaikan karena Allah SWT dan pihak-pihak yang membantu.

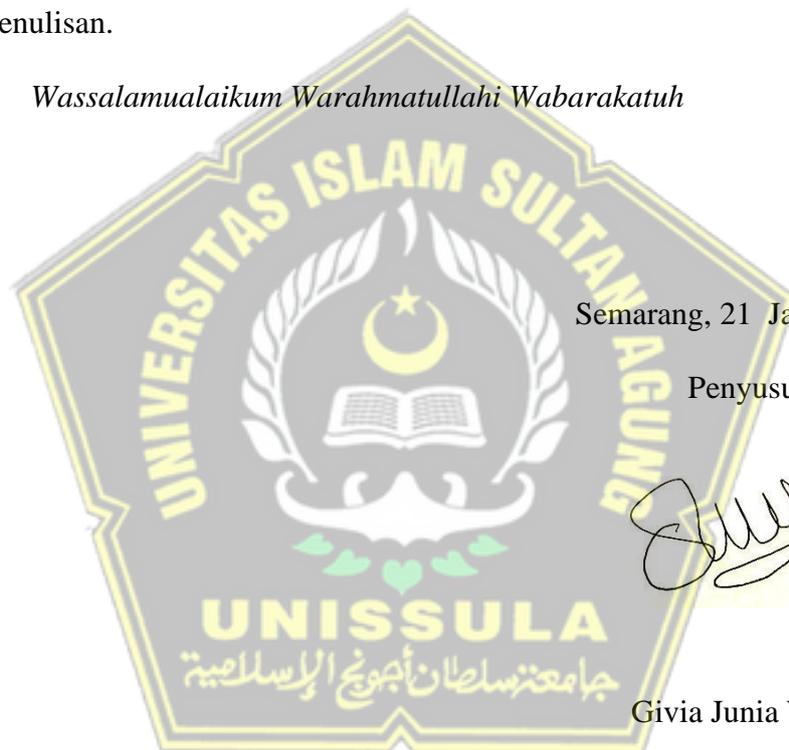
Penulis mengucapkan rasa syukur dan terimakasih dari berbagai dukungan dan bantuan dari pihak yang membantu atas motivasinya, bimbingannya, dan kepada orangtua yang selalu support terhadap penulis atas kasih sayang dan dukungan moril dan materilnya. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT
2. Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Prof. Dr. H. Gunarto., M., M.Hum.
3. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agug, Bpk Prof. Heru Sulisty, SE., M.Si.
4. Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, Ibu Provita Wijayanti SE., M.Si., Ak., CA

5. Dosen Pembimbing Lapangan, Dr. Chrisna Suhendi, MBA., SE., Ak.Ca senantiasa membimbing, memberi arahan, serta masukan yang sangat bermanfaat untuk penulis dalam penyusunan laporan magang.
6. Dosen Supervisor, Adityo Gineung Pratidina, S.S yang telah memberikan arahan, pengetahuan, dan pengalaman yang sangat berharga selama proses magang di DPU Kota Semarang memberi arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan laporan magang.
7. Bapak dan Ibu Dosen, Karyawan dan Civitas Akademik Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bekal ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan magang ini.
8. Pegawai DPU Kota Semarang memberikan ilmu dan pengalamannya sehingga penulisan laporan ini dapat terselesaikan karena dari berbagai informasinya.
9. Mama dan Ayah yang selalu mendukung penuh kegiatan saya hingga akhirnya dapat menyelesaikan laporan ini.
10. Rahmawati Setyawanda yang sudah menjadi adik serta sahabat pergi kemana-mana dan mensupport penuh apapun keadaan saya.
11. Resna Reformasi dan Teman terdekat saya yang selalu memberi motivasi dalam penyusunan laporan ini.
12. Dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu per satu saya ucapkan terimakasih.

Penulis menyadari kekurangan dalam penulisan laporan ini karena keterbatasan dan kemampuan karena tidak ada manusia yang sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan masukan terhadap kritik dan saran untuk menyempurnakan penulisan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terkhusus penulis sendiri dan yang nanti akan menjalankan program magang selanjutnya dapat dijadikan suatu referensi penulisan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Semarang, 21 Januari 2023

Penyusun,

Givia Junia Wanda

NIM : 3140190007

ABSTRAK

Semakin pesatnya teknologi membuat perubahan di berbagai bidang diantaranya pada bidang informasi. Peralihan sistem SIPD, mendukung perencanaan program yang mengintegrasikan data agar efektif berdasarkan program pada instansi daerah masing-masing. Sistem SIPD adalah sistem yang memuat data informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, pengawasan dan pembinaan daerah yang menggunakan konsep secara langsung dengan pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan adanya penggunaan aplikasi ini adalah untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas, inovatif dan cepat. Serta untuk mempermudah daerah dalam melaksanakan tahapan perencanaan dan penyusunan dokumen perencanaan maupun penganggaran by-system aplikasi yang sudah terintegrasi dan seragam di seluruh daerah.

Metode analisis pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif melalui data primer yang di peroleh melalui wawancara dan penyebaran kuesioner. Hasil dari penelitian ini bisa ditarik kesimpulan bahwa penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sangat mudah digunakan bagi pegawai Dinas PU Kota Semarang. Namun penggunaannya belum terlalu efektif karena aplikasi ini belum lama digunakan. Pemerintah juga akan selalu mengupdate dan memperhatikan kualitas. Selain itu penggunaan aplikasi ini juga memberikan rasa aman pada para pegawai dinas Pu dan cukup mendukung kebutuhan pemrosesan informasi yang di butuhkan.

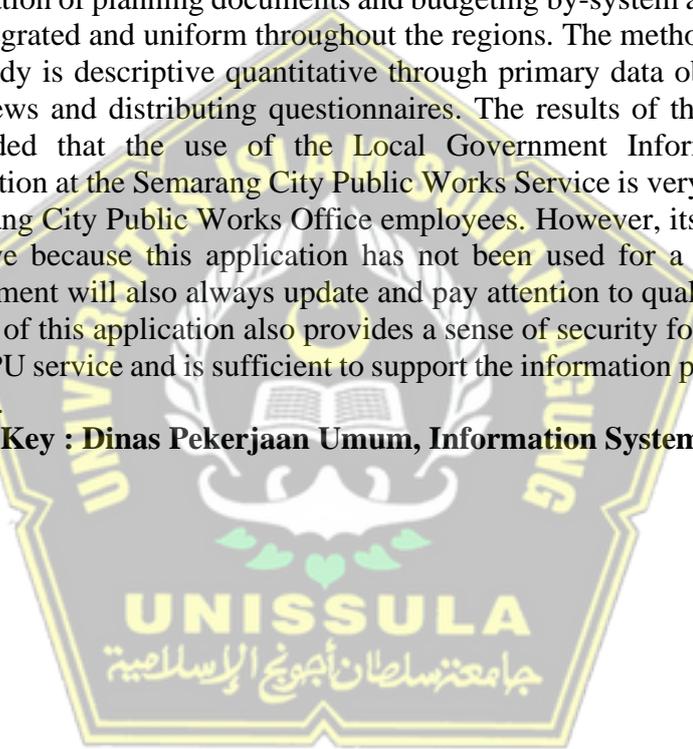
Kata kunci : Dinas Pekerjaan Umum, Sistem Informasi, SIPD



ABSTRACT

The rapid development of technology makes changes in various fields including the information sector. The transition to the SIPD system supports program planning that integrates data so that it is effective based on the program in each regional agency. The SIPD system is a system that contains information data in regional financial management, development planning, supervision and development of regions that uses the concept directly by utilizing information technology. The purpose of using this application is to encourage higher quality, innovative and fast government administration. As well as to make it easier for the regions to carry out the stages of planning and preparation of planning documents and budgeting by-system applications that are integrated and uniform throughout the regions. The method of analysis in this study is descriptive quantitative through primary data obtained through interviews and distributing questionnaires. The results of this study can be concluded that the use of the Local Government Information System application at the Semarang City Public Works Service is very easy to use for Semarang City Public Works Office employees. However, its use is not very effective because this application has not been used for a long time. The government will also always update and pay attention to quality. In addition, the use of this application also provides a sense of security for the employees of the PU service and is sufficient to support the information processing needs needed.

Key : Dinas Pekerjaan Umum, Information Systems, SIPD



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN LAPORAN MAGANG.....	iii
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
LAMPIRAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Magang	7
BAB II.....	8
PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG.....	8
2.1 Profil Organisasi	8
2.2 Visi dan Misi	10
2.3 Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang	11
2.4 Aktivitas Magang	21
BAB III	24
IDENTIFIKASI MASALAH.....	24
3.1 Identifikasi Masalah	24
BAB IV	25
KAJIAN PUSTAKA	25
4.1 Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum	25
4.1.1 Aspek Sumber Daya Manusia.....	25
4.2.1 Aspek Sistem.....	27
4.2 Indikator Kinerja	30
4.2.1 Critical Success Factor (CSF)	31
4.3 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	32
4.3.1 Sistem Informasi	32
4.3.2 Pengertian SIPD	33
4.3.3 Tujuan Dan Manfaat SIPD.....	37
BAB V	39
METODA PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA	39
5.1 Metoda Pengumpulan Data	39
5.2 Jenis dan Sumber Data	40
5.3 Metode Analisis Data	40
BAB VI.....	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
6.1 Deskripsi Karakteristik Responden	43
6.2 Analisis Data	46

6.2.1 Uji Realibilitas	46
6.2.2 Uji Statistik Deskriptif	47
6.3 Pembahasan	50
6.3.1 Efektifitas Penggunaan Aplikasi SIPD.....	50
6.3.2 Upaya Dalam Mengatasi Hambatan.....	54
BAB VII.....	56
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	56
7.1 Kesimpulan	56
7.2 Rekomendasi.....	56
BAB VIII	57
REFLEKSI DIRI.....	57
8.1 Hal Positif dari Perkuliahan yang Bermanfaat terhadap Pekerjaan Selama Magang.....	57
8.2 Manfaat Magang terhadap Pengembangan Soft Skill Mahasiswa.....	57
8.3 Manfaat Magang terhadap Pengembangan Kemampuan Kognitif Mahasiswa.....	58
8.4 Kunci Sukses Bekerja Berdasarkan Pengalaman Magang	58
8.5 Rencana Pengembangan Diri, Karir, dan Pendidikan Mahasiswa.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	62



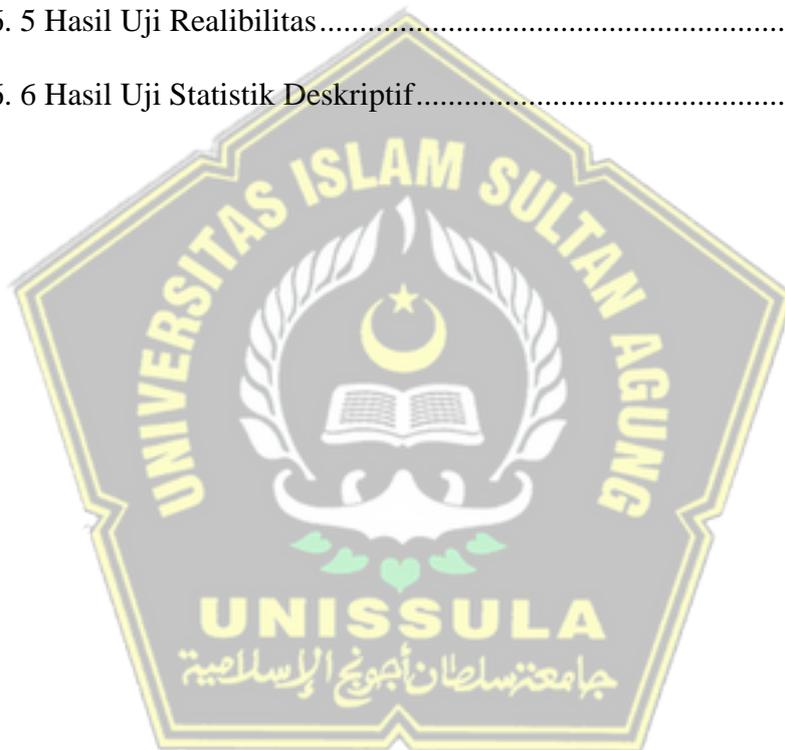
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Bagan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.....	10
Gambar 4. 1 Tampilan Aplikasi SIPD	37



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jam Kerja	23
Tabel 6. 1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	43
Tabel 6. 2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia	44
Tabel 6. 3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	44
Tabel 6. 4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Kerja.....	45
Tabel 6. 5 Hasil Uji Realibilitas.....	46
Tabel 6. 6 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	47



LAMPIRAN

Lampiran 1 : DAFTAR HADIR PESERTA MAGANG MB-KM	63
Lampiran 2 : LOGBOOK PESERTA MAGANG MBKM	76
Lampiran 3 : DOKUMENTASI SELAMA KEGIATAN MAGANG.....	85
Lampiran 4 : DOKUMENTASI PENYEBARAN KUESIONER (PENELITIAN)	86
Lampiran 5 : DOKUMENTASI PENYEBARAN KUESIONER (PENELITIAN)	87
Lampiran 6 : DOKUMENTASI PENYEBARAN KUESIONER (PENELITIAN)	88
Lampiran 7 : PROSES WAWANCARA DENGAN PEGAWAI DPU KOTA SEMARANG	89
Lampiran 8 : LAMPIRAN KUESIONER	90
Lampiran 9 : TABEL DESKRITIP KUALITAS SISTEM	94



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah meningkatkan program untuk pembangunan dari berbagai bidang salah satunya bidang informasi untuk mencapai tujuan dalam menyampaikan informasi secara utuh dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini menjadi harapan untuk keberlangsungan di masa depan.

Semakin berkembangnya zaman maka perlu bagi pemerintah agar dengan mudah dalam mengoperasikan dan mendayagunakan informasi secara tepat dan akurat. Teknologi informasi yang diperlukan adalah dalam mengelola keuangan daerah. Teknologi informasi ini berguna untuk pemerintah daerah dalam penyusunan laporan keuangan agar lebih efektif efisien serta akuntabel.

Dengan diluncurkannya Pemendagri No. 77 Tahun 2020 dengan mengganti Pemendagri sebelumnya yaitu Pemendagri No. 13 Tahun 2006, seluruh OPD Kota Semarang sudah mengurangi penggunaan aplikasi SIMDA melainkan lebih memfokuskan pada penggunaan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah).

Dalam rangka melakukan pertanggungjawaban proses Perencanaan serta Anggaran, penggunaan teknologi adalah kewajiban yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah. Percepatan penerapan SIPD diharapkan agar Pemerintah Daerah segera menyatukan seluruh sistem dengan data

pembangunan wilayah serta data keuangan wilayah ke SIPD. Hal ini merupakan porsi penting dalam mengambil alih kendali guna mencapai tujuan yang telah diharapkan (Ekaputra, 2021)

Dijelaskan juga dalam UU tersebut, data yang harus disediakan tidak hanya berupa Data Pembangunan dan Keuangan Daerah, namun juga bisa menata data pemerintahan yang lain. Dalam menindaklanjuti terselenggaranya proses Perencanaan serta Anggaran, pemerintahan daerah memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan serta menggunakan perkembangan teknologi data guna bisa melaksanakan serta menyalurkan data Perencanaan serta Anggaran secara transparansi terhadap masyarakat.

Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan fasilitas dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi pembangunan, informasi keuangan serta informasi pemerintahan lainnya bagi pengambilan keputusan baik di daerah maupun di pusat. Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui kerjasama berbasis teknologi sehingga dapat membangun database yang ada di daerah serta dapat menggambarkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah dalam mendukung pengembangan sistem informasi pengelolaan daerah yang valid dan akurat.

Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) SIMDA merupakan suatu sistem untuk mengelola keuangan dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). SIMDA dirancang untuk membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya baik di tingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) maupun SKPKD (Satuan Kerja

Pengelola Keuangan Daerah). SIMDA memiliki beberapa keunggulan Output/Laporan disesuaikan peraturan yang berlaku dan fleksibel, dapat menghasilkan informasi sesuai dengan kebutuhan yang berbasis windows. Validasi Inputan data lebih terjamin dengan memfasilitasi setiap fungsi pengelolaan keuangan daerah dengan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sekaligus melakukan pencatatan akuntansi. Pihak legislatif dapat menggunakannya dalam melakukan *monitoring* terhadap kinerja pemerintah daerah, SIMDA menjadi salah satu upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi secara cepat, tepat, lengkap, akurat, dan terpadu, untuk menunjang proses administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan memfasilitasi partisipasi dan dialog publik dalam perumusan kebijakan.

Sistem informasi SIMDA dialihkan dikarenakan memiliki peranan yang tidak dapat di *monitoring* dalam perbelanjaan dalam satu pintu dan informasi dapat terintegrasi dan dipantau oleh DPRD secara *realtime*. Peralihan sistem SIPD ini memiliki perbandingan dengan sistem SIMDA yaitu diantaranya dalam proses pelaporan, menyajikan informasi secara mandiri berkelanjutan yang diantaranya pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan dalam *single codebase*, berguna untuk penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan. Dengan adanya standarisasi penamaan, pemberian kode, pengelompokan informasi dalam *single codebase*, maka akan menjadikan tata kelola pemerintah daerah semakin transparan,

akuntabilitas, responsif, serta efektif sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Dikutip dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), salah satu wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berfungsi sebagai sistem yang memuat data informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, pengawasan dan pembinaan daerah yang menggunakan konsep secara langsung dengan pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan sistem ini menjadi dukungan terhadap perencanaan program yang mengintegrasikan data agar efektif berdasarkan program pada instansi daerah masing-masing.

Tujuan penggunaan aplikasi SIPD bagi Pemerintah Daerah, baik di Provinsi, maupun Kabupaten/Kota adalah untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas, inovatif dan cepat. Tujuan Kemendagri meluncurkan dan menerapkan SIPD ini adalah untuk mempermudah daerah dalam melaksanakan tahapan perencanaan dan penyusunan dokumen perencanaan maupun penganggaran by-system aplikasi yang sudah terintegrasi dan seragam di seluruh daerah.

Saat ini pemerintah daerah baik kota ataupun kabupaten bersama-sama menerapkan suatu sistem informasi dalam pengelolaan daerahnya menggunakan SIPD. Sistem Informasi Pemerintah Daerah menjadi aplikasi terpadu pemerintah daerah dalam mengimplementasikan program perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan. (Djoko, 2010).

Pengelolaan keuangan harus menyesuaikan berdasarkan peraturan pemerintah maupun pedoman teknis pelaksanaannya guna mengoptimalkan penggunaan secara efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan menghindari masalah terhadap ketidakpatuhan dengan undang-undang, namun perubahan peraturan dari waktu ke waktu menyebabkan adanya ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan daerah dengan pedoman pelaksanaannya.

Tetapi Dinas Pekerjaan Umum belum menggunakan aplikasi terbaru yaitu aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) karena aplikasi SIPD dinilai belum optimal, sehingga Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang masih menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Kota Semarang terbilang baru dalam menerapkan aplikasi SIPD sehingga ditemukan beberapa kendala yang dihadapi seperti pengoperasiannya yang dialami pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang *server error* karena aplikasi belum sepenuhnya sempurna dan *human error* permasalahan itu masih banyak ditemukan pegawai yang belum memahami penggunaan aplikasi SIPD dengan baik yang masih perlu pendampingan,

Penerapan aplikasi SIPD di Kota Semarang akan kurang efektif jika dalam penerapannya masih ditemukan hambatan-hambatan. Untuk mengetahui hambatan- hambatan dalam penerapan aplikasi SIPD aplikasi penyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah penulis memberikan

pertanyaan kepada narasumber yaitu, hambatan apa saja yang dihadapi setelah aplikasi SIPD diterapkan. Hambatan yang dihadapi adalah kurangnya pemahan dari perangkat daerah mengenai Permendagri Nomor 70 tahun 2019 yang membahas perubahan nomenklatur kegiatan dan pengoperasian dari aplikasi SIPD tersebut.

Penerapan aplikasi SIPD di Kota Semarang akan kurang efektif jika dalam penerapannya masih ditemukan hambatan-hambatan. Untuk mengetahui hambatan- hambatan dalam penerapan aplikasi SIPD aplikasi penyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah penulis memberikan pertanyaan kepada narasumber yaitu, hambatan apa saja yang dihadapi setelah aplikasi SIPD diterapkan. Hambatan yang dihadapi adalah kurangnya pemahan dari perangkat daerah mengenai Permendagri Nomor 70 tahun 2019 yang membahas perubahan nomenklatur kegiatan dan pengoperasian dari aplikasi SIPD tersebut.

Maka saya sebagai penulis mengajukan laporan magang ini yang berjudul **“Efektivitas Penggunaan Aplikasi SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang“**

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang menjelaskan beberapa permasalahan yang dialami oleh DPU Kota Semarang dalam penerapan Aplikasi SIPD, sehingga didapat rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana efektifitas penggunaan aplikasi SIPD di Dinas Pekerjaan

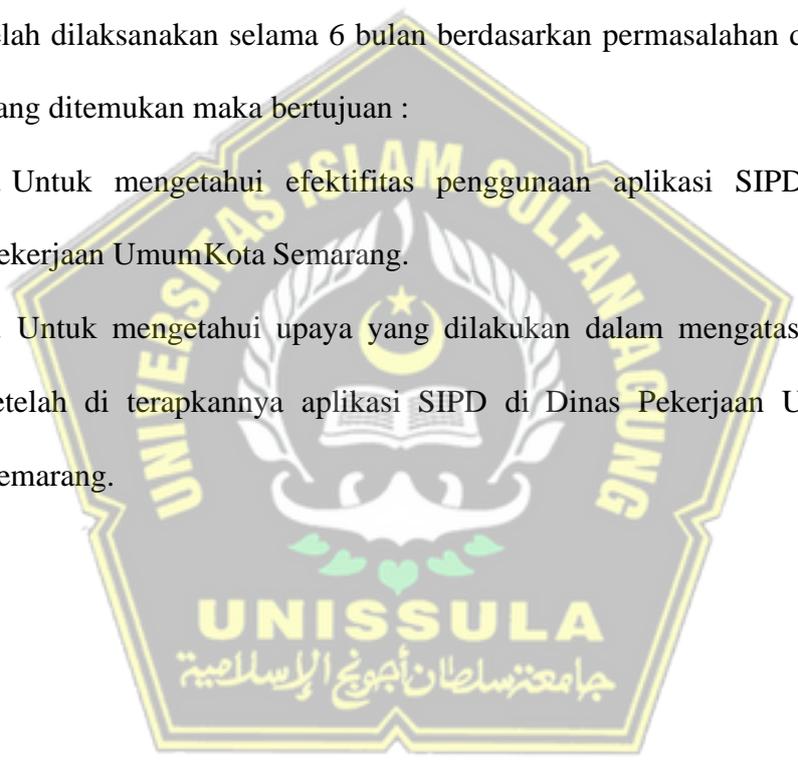
Umum Kota Semarang?

2. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi setelah di terapkannya aplikasi SIPD di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang?

1.3 Tujuan Magang

Dilakukannya magang di DPU Kota Semarang sebagaimana yang telah dilaksanakan selama 6 bulan berdasarkan permasalahan dan kendala yang ditemukan maka bertujuan :

1. Untuk mengetahui efektifitas penggunaan aplikasi SIPD di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan setelah di terapkannya aplikasi SIPD di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang.



BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

2.1 Profil Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Semarang terbentuk dari bidang perangkat daerah Dinas Binas Marga serta Dinas pengelolaan Sumber Daya Air hal ini didasari oleh Perda Kota Semarang nomor 14 tahun 2016 dan Peraturan Walikota Semarang nomor 63 tahun 2016 yang mengatur tentang susunan perangkat, kedudukan dan fungsi pada DPU Kota Semarang.

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Pekerjaan Umum berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas, fungsi dan tata kerja DPU Kota Semarang diuraikan kedalam masing-masing sub unit kerja, yaitu :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Keuangan; dan

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Rekayasa Teknis, terdiri dari :

1) Seksi Perancangan Teknis;

2) Seksi Survey Pengukuran dan Penyiapan Lahan; dan

3) Seksi Pengembangan Teknologi.

c. Bidang Bina Marga, terdiri dari :

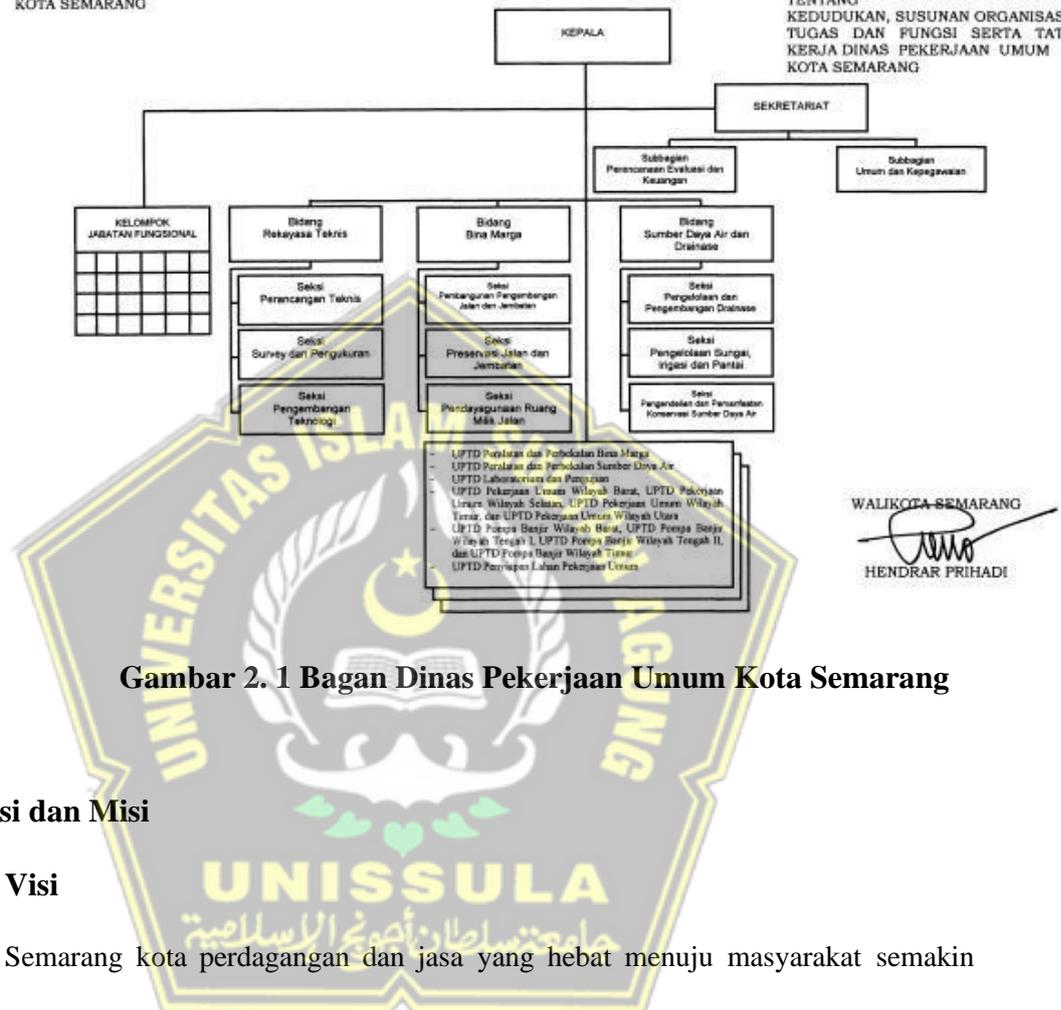
- 1) Seksi Pembangunan, Pengembangan Jalan dan Jembatan;
- 2) Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan; dan
- 3) Seksi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan.

d. Bidang Sumber Daya Air dan Drainase, terdiri dari :

- 1) Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Drainase;
- 2) Seksi Pengelolaan Sungai, Irigasi dan Pantai; dan
- 3) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

- 1) UPTD Peralatan dan Perbekalan Bina Marga
- 2) UPTD Peralatan dan Perbekalan Sumber Daya Air
- 3) UPTD Laboratorium dan Pengujian
- 4) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Barat
- 5) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Selatan
- 6) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Timur
- 7) UPTD Pekerjaan Umum Wilayah Utara
- 8) UPTD Pompa Banjir Wilayah Barat



Gambar 2. 1 Bagan Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

2.2 Visi dan Misi

a. Visi

Semarang kota perdagangan dan jasa yang hebat menuju masyarakat semakin sejahtera.

b. Misi

Terwujudnya pembangunan kota tangguh, produktif serta berkelanjutan.

2.3 Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Tugas pokok DPU Kota Semarang adalah melaksanakan proyek-proyek yang telah direncanakan, selain itu ruang lingkup DPU adalah mengelola keuangan daerah, tata ruang, merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan Binamarga,

Sumber daya air, sanitasi dan drainase, pengelolaan pelayanan publik dan berbagai tugas yang diberikan oleh walikota berdasarkan undang-undang yang berlaku

Dinas Pekerjaan umum melaksanakan fungsi pelaksanaan dan pembinaan, memfasilitasi, serta melakukan evaluasi dalam pelaksanaan program pembangunan berdasarkan bidang sub unit kerja yang telah ditetapkan Peraturan Walikota Semarang nomor 63 tahun 2016.

1. Kepala DPU Kota Semarang

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang dan bidang lingkungan hidup melalui perumusan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan bina marga, sumber daya air, cipta karya, tata ruang dan tata perkotaan, air bersih, sanitasi dan drainase, pertamanan, persampahan serta pembinaan jasa konstruksi serta tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsinya sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis & aplikasi pelatihan aktivitas bersinar-sinar marga, asal daya air, cipta karya, rapikan ruang & rapikan kota, landskap & persampahan dan jasa konstruksi menurut kebijakan generik yg ditetapkan sang Walikota sinkron

menggunakan peraturan perundang-undangan yg berlaku

- Pelaksanaan, fasilitasi, pelatihan & penilaian penyelenggaraan aktivitas bersinar-sinar marga

- Pelaksanaan, fasilitasi, pelatihan & penilaian penyelenggaraan aktivitas rapikan ruang & rapikan perkotaan, yg meliputi pengendalian pembangunan fasilitas pada daerah perkotaan, pembangunan & pemeliharaan lanskap & pengelolaan persampahan.

2. Sekretaris

Sekretaris memiliki tugas merencanakan, mengkoordinasikan & mensinkronisasikan, membina, mengawasi & mengendalikan dan mengevaluasi aplikasi tugas Kesekretariatan, Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air & Drainase, & UPTD & sebagainya. Adapun kegunaannya menjadi berikut :

- Perencanaan acara, aktivitas & anggaran;
- Pendistribusian tugas pada bawahan;
- Pemberian petunjuk pada bawahan;
- Penyeliaan tugas bawahan pada lingkup tanggungjawabnya;
- Pelaksanaan aktivitas penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- Pengkoordinasian, sinkronisasi, pelatihan, supervisi & pengendalian & penilaian tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air &

Drainase, & UPTD;

- Pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Rekayasa Teknis, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air & Drainase, & UPTD;

- Pelaksanaan koordinasi menggunakan perangkat wilayah lainnya & instansi

- Pelaksanaan aktivitas penyusunan kebijakan pada subbagian perencanaan, penilaian & keuangan, & subbagian generik & kepegawaian;

- Pelaksanaan aktivitas Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, & Rencana Kinerja Tahunan;

- Pelaksanaan koordinasi & pembuktian penyusunan Rencana Kegiatan & Anggaran & Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum;

- Pelaksanaan aktivitas fasilitasi Reformasi Birokrasi Dinas Pekerjaan Umum;

- Pelaksanaan aktivitas penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum;

- Pelaksanaan aktivitas penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;

- Pelaksanaan aktivitas penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- Pelaksanaan aktivitas pengelolaan & penatausahaan keuangan

Dinas Pekerjaan Umum;

- Pelaksanaan pengelolaan honor & tunjangan pada lingkungan

Dinas Pekerjaan Umum;

- Pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, keputakaan, dokumentasi, keprotokolan & kehumasan Dinas Pekerjaan Umum;

- Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, asal daya air & listrik;

- Pelaksanaan penyediaan akomodasi & jamuan rapat / pertemuan, & kunjungan tamu pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;

- Pelaksanaan aktivitas Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang inventaris, & pemeliharaan prasarana & wahana kantor;

- Pelaksanaan penatausahaan barang gunakan habis & barang inventaris;

- Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian pada lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;

- Pelaksanaan pengelolaan sistem berita & komunikasi Dinas Pekerjaan Umum;

- Pelaksanaan penyusunan & pelayanan data & berita Dinas Pekerjaan Umum;

- Pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai pada lingkup tanggungjawabnya;

- Pelaksanaan monitoring & penilaian acara & aktivitas;

- Pelaksanaan penyusunan laporan acara & aktivitas; &

- Pelaksanaan fungsi lain yg diberikan sang pimpinan sinkron tugas da fungsinya.

3. Bina Marga

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pembangunan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan. Adapun fungsinya sebagai berikut :

- Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Bina Marga;
- Pelaksanaan kegiatan Seksi Pembangunan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan dan Seksi Pendayagunaan Ruang Milik Jalan;
- Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Bina Marga;
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Bina Marga;
- Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Sumber Daya Air dan Drainase

Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Drainase, Seksi Pengelolaan Sungai, Irigasi dan Pantai, dan Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air. Adapun tupoksinya sebagai berikut:

- Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
- Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Drainase, Seksi Pengelolaan Sungai, Irigasi dan Pantai, dan Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Konservasi Sumber Daya Air;
- Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang

Sumber Daya Air dan Drainase:

- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Sumber Daya Air dan Drainase;
- Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. Rekayasa Teknis

Kepala Bidang Rekayasa Teknis mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Perancangan Teknis, Seksi Survey dan Pengukuran, dan Seksi Pengembangan Teknologi. Adapun fungsinya sebagai berikut :

- Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Rekayasa Teknis;

- Pelaksanaan kegiatan Seksi Perancangan Teknis, Seksi Survey dan Pengukuran, dan Seksi Pengembangan Teknologi;
- Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Rekayasa Teknis;
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Rekayasa Teknis;
- Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. UPTD Wilayah

Direktorat Pemeliharaan dan Penyehatan Jalan Wilayah UPTD bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu dari dinas pekerjaan umum, khususnya pengelolaan, pengoperasian dan pemeliharaan jalan dan sanitasi wilayah intervensinya. Fungsinya adalah sebagai berikut:

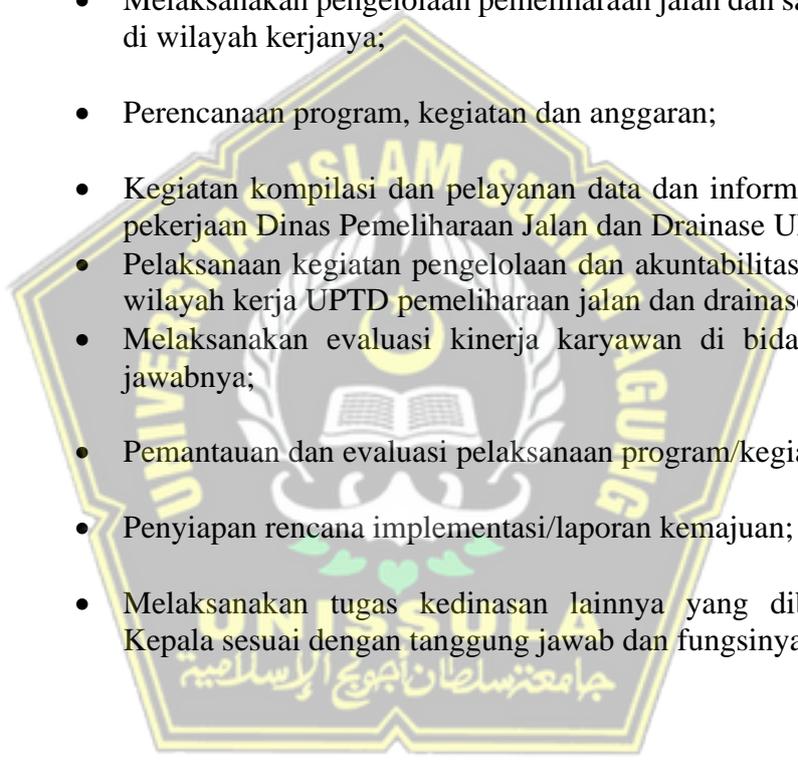
- perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- Memberikan tugas kepada bawahan;
- Memberikan instruksi kepada bawahan;
- Mengawasi tugas bawahan di dalam wilayah tanggung jawabnya;

- Pelaksanaan kegiatan persiapan tujuan ketenagakerjaan bagi karyawan;
- Berkoordinasi dengan badan regional lainnya dan instansi terkait sesuai arahan manajemen;
- Persiapan pelaksanaan program pemeliharaan jalan dan drainase di wilayah kerjanya;
- Melaksanakan pemeliharaan jalan dan drainase di area kerja;
- Mengarahkan, memantau, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang pemeliharaan jalan dan drainase di wilayah kerjanya;
- Menyusun pedoman teknis dan pedoman model pemeliharaan dan drainase jalan di wilayah kerja;
- Inventarisasi dan pendataan aset pemeliharaan jalan dan drainase di wilayah kerja;
- Pengelolaan pelaksanaan UPTD pemeliharaan jalan.
- pelaksanaan ketatausahaan UPTD Pemeliharaan Jalan.

7. UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Pekerjaan Umum meliputi pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan jalan dan drainase di wilayah kerjanya. Adapun fungsinya sebagai berikut :

- Memberikan tugas kepada bawahan;
- Memberikan instruksi kepada bawahan;
- Mengawasi tugas bawahan di dalam wilayah tanggung jawabnya;
- Pelaksanaan kegiatan persiapan tujuan ketenagakerjaan bagi karyawan;
- Berkoordinasi dengan badan regional lainnya dan instansi terkait sesuai arahan manajemen;

- Persiapan pelaksanaan program pemeliharaan jalan dan drainase di wilayah kerjanya;
- Melaksanakan pemeliharaan jalan dan drainase di area kerja;
- Mengarahkan, memantau, mengawasi dan mengendalikan kegiatan di bidang pemeliharaan jalan dan drainase di wilayah kerjanya;
- Menyusun pedoman teknis dan pedoman model pemeliharaan jalan dan drainase di wilayah kerja;
- Inventarisasi dan pendataan aset pemeliharaan jalan dan drainase di wilayah kerja;
- Melaksanakan pengelolaan pemeliharaan jalan dan sanitasi UPTD di wilayah kerjanya;
- Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- Kegiatan kompilasi dan pelayanan data dan informasi di bidang pekerjaan Dinas Pemeliharaan Jalan dan Drainase UPTD;
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan di wilayah kerja UPTD pemeliharaan jalan dan drainase;
- Melaksanakan evaluasi kinerja karyawan di bidang tanggung jawabnya;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
- Penyiapan rencana implementasi/laporan kemajuan; Dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya



2.4 Aktivitas Magang

Pelaksanaan magang berbasis program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang yang ditempuh kurang lebih 4 bulan, adapun Pekerjaan magang yang dikerjakan :

1. Mengajukan surat pensiun bagi pegawai yang sudah meninggal di Balai Kota
2. Melengkapi berkas pengajuan taspen
3. Menomeri surat SPPD
4. Melakukan pengisian formulir taspen
5. Mempelajari SIPD
6. Mengarsipkan berkas sesuai dengan kodenya
7. Mempelajari perhitungan PPN & PPh untuk pembuatan Id. Billing
8. Melakukan dan mempelajari perhitungan gaji Non PNS

Kegiatan ini memberikan pengalaman dan persoalan kerja yang bisa membantu untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Contohnya bagaimana tatacara menghubungi atasan, berkomunikasi dengan rekan kerja, maupun etika kerjasama tim. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sudah menerapkan data input berbasis komputer, penginputan data secara manual sudah sangat jarang diterapkan. Mahasiswa diminta untuk memperhatikan pegawai saat menginput data di aplikasi lalu mahasiswa menanyakan beberapa hal dan mencatatnya ketika ada masalah internal maupun external.

Mahasiswa di beritahu pokok permasalahan dan cara mengatasinya, adapun tugas pekerjaan lainnya diantaranya:

1. Menerima tamu dan mengarahkan sesuai keperluannya (di loby)
2. Menginput dan mengarsipkan surat masuk dan keluar
3. Melakukan scan, fotocopy, stempel berkas
4. Ikut membantu dan mendampingi ketika ada pegawai yang tugas di luar(seperti sosial).

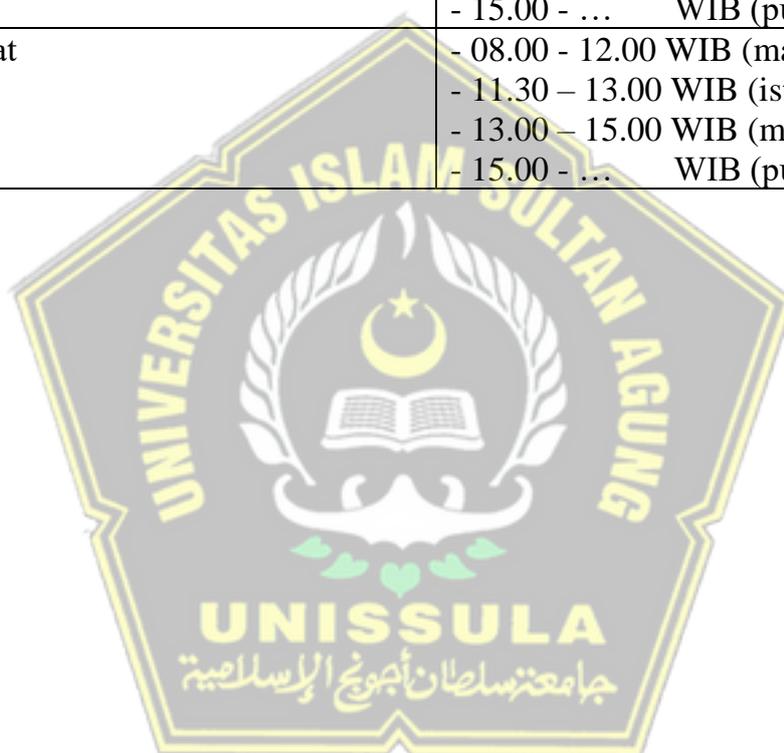
Kegiatan ini memberikan pengalaman dan persoalan kerja yang bisa membantu untuk menghadapi dunia kerja yang sesungguhnya. Contohnya bagaimana tatacara menghubungi atasan, berkomunikasi dengan rekan kerja, maupun etika kerjasama tim. Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sudah menerapkan data input berbasis komputer, penginputan data secara manual sudah sangat jarang diterapkan. Mahasiswa diminta untuk memperhatikan pegawai saat menginput data di aplikasi lalu mahasiswa menanyakan beberapa hal dan mencatatnya ketika ada masalah internal maupun external, mahasiswa di beritahu pokok permasalahan dan cara mengatasinya. Adapun tugas pekerjaan lainnya diantaranya :

1. Menerima tamu dan mengarahkan sesuai keperluannya (di loby)
2. Menginput dan mengarsipkan surat masuk dan keluar
3. Melakukan scan, fotocopy, stempel berkas
4. Ikut membantu dan mendampingi ketika ada pegawai yang tugas di luar(seperti sosialisasi)

Tabel 2. 1 Jam Kerja

**RINCIAN JAM KERJA PEGAWAI DINAS PEKERJAAN
UMUM KOTA SEMARANG**

Hari Kerja	Jam Kerja
Senin – Kamis	- 08.00 - 12.00 WIB (masuk) - 12.00 – 13.00 WIB (istirahat) - 13.00 – 15.00 WIB (masuk) - 15.00 - ... WIB (pulang)
Jum'at	- 08.00 - 12.00 WIB (masuk) - 11.30 – 13.00 WIB (istirahat) - 13.00 – 15.00 WIB (masuk) - 15.00 - ... WIB (pulang)



BAB III

IDENTIFIKASI MASALAH

3.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan ditemukan pada penggunaan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) diantaranya :

1. Sistem aplikasi yang baru diterapkan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang tersebut tergolong masih baru dalam penggunaannya terhitung 1 tahun dan kendala yang dialami adalah aplikasi yang belum sempurna, hal ini dibuktikan dengan pengamatan keseharian pada penginputan terhadap aplikasi SIPD yang belum sepenuhnya sesuai dengan Pemendagri No. 77 Tahun 2020, seperti server eror dan tidak stabil sehingga dalam melakukan kegiatan mengalami hambatan penyusunan.
2. Pegawai yang belum memahami penggunaan aplikasi SIPD dengan baik, seperti dalam melakukan penginputan data yang terdapat dalam SIPD karena terbilang penerapan sistem ini masih baru sekitar 1 tahun terakhir.

BAB IV

KAJIAN PUSTAKA

4.1 Standar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum

Standar pelayanan untuk pelayanan pekerjaan umum didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi tata pemerintahan yang baik Tata kelola yang baik didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, efisiensi dan efektivitas, akuntabilitas, kontrol yang baik, dan daya tanggap. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah

Pemerintah daerah melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan dan meminta pertanggungjawaban masyarakat sesuai dengan mandat dan fungsinya. Oleh karena itu, smart government harus memiliki sumber daya manusia yang profesional untuk menjadikan pengejaran kebijakan publik sebagai langkah operasional yang sejalan dengan kepentingan masyarakat.

4.1.1 Aspek Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah fungsi utama yang menjalankan semua kegiatan mulai dari perencanaan hingga keberhasilan Menurut Ashari (2010), agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif dan optimal, diperlukan penerapan tahapan-tahapan prinsip-prinsip pengelolaan yang berlandaskan kelembagaan, manajemen, dan sumber daya manusia untuk mewujudkan (good governance).

Sumber daya manusia dalam suatu lembaga menjadi faktor penentu

dalam suatu sistem perencanaan, dengan tujuan agar sumber daya manusia yang ada bekerja sesuai dengan kemampuannya dalam suatu jabatan atau pekerjaan, oleh karena itu memerlukan bantuan dan pelatihan”. mempelajari pekerjaan untuk memfasilitasi - pengetahuan, keterampilan, dan perilaku karyawan yang relevan.” Pelatihan menjadi upaya terencana untuk mempelajari pekerjaan berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku karyawan (Gary Dessler, 1997) Hasil yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan sumber daya manusia yang dimiliki.
2. Membantu meningkatkan keterampilan profesional dan menguasai teknologi terkini.
3. Melatih karyawan untuk bekerja secara efektif sebagai tim untuk memberikan layanan berkualitas Agar lembaga bergerak pada inovasi, kreatif dan evaluatif.
4. Memberi karyawan rasa aman untuk berkontribusi pada institusi saat bekerja.

4.2.1 Aspek Sistem

Sistem didukung oleh berbagai operasi, fasilitas, perangkat lunak dan data sebagai satu kesatuan Sistem diubah menjadi sistem informasi terkomputerisasi, terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras, diubah menjadi data informasi yang berguna. (O'Brien dan Marakas 2009) Suatu sistem akan bekerja dan bertahan lama, menjaga sistem untuk mencapai penggunaan aplikasi sistem informasi untuk mencapai kesempurnaan sistem

Sebuah sistem informasi terdiri dari serangkaian komponen sistem, seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan otak, yang mengelola keluaran informasi yang memfasilitasi pencapaian tujuan lembaga. Sistem informasi terdiri dari lima bagian: sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data dan jaringan. Kelima komponen tersebut memegang peranan yang sangat penting dalam pengelolaan sistem informasi Saat memperbarui sistem informasi terintegrasi yang kompleks, pendekatan siklus hidup sistem dapat diterapkan, termasuk fase perencanaan, analisis, desain, implementasi, evaluasi, penggunaan, dan pemeliharaan (Octomo, 2002).

Menurut DeLone & Mclean (1992) keberhasilan sistem yang diterapkan adalah model yang lengkap namun sederhana, yang disebut parsimony Model yang diusulkan mencerminkan saling ketergantungan dari enam ukuran keberhasilan SI. Keenam elemen atau faktor atau komponen atau ukuran model tersebut adalah:

1. Kualitas Sistem (*Sistem Quality*)
2. Kualitas Informasi (*Information Quality*)
3. Penggunaan (*Use*)
4. Kepuasan Pemakai (*User Satisfaction*)
5. Dampak Individual (*Individual Impact*)
6. Dampak Organisasi (*Organization Impact*)

Model sukses ini didasarkan pada proses dan hubungan sebab akibat dari dimensi model Model tersebut tidak mengukur enam dimensi untuk mengukur keberhasilan suatu sistem informasi secara mandiri, tetapi mengukur bagaimana pengaruhnya terhadap aspek lain secara keseluruhan. (Mariana, N 2006).

Menurut Kebijakan Pengelolaan Data Pemerintah Nomor 1 Perpres Nomor 39 Tahun 2019, SIPD tergolong memiliki sistem yang terintegrasi dengan baik untuk menghasilkan data yang akurat, terkini, terintegrasi dan akuntabel, serta melalui kepatuhan di instansi pusat dan daerah Mudah akses dan berbagi standar data, metadata, interoperabilitas data, dan penggunaan kode referensi dan data master

antar organisasi. Sangat rumit dalam sistem aplikasi SIPD.

Menurut Sutrisno (2007:125) mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu :

1. Pemahaman Program

Pemahaman suatu program adalah melihat bagaimana suatu program memungkinkan semua pihak yang terlibat mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, serta memahami maksud dari program yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini peran produser program sangat diperlukan untuk mensosialisasikan program.

2. Tepat Sasaran

Fokus pada bagaimana mencapai tujuan program atau bagaimana lulus atau gagal program.

3. Tepat waktu

Bagaimana, dalam suatu kegiatan atau program, waktu pelaksanaan yang direncanakan diatur dan dikelola agar tujuan yang ada dapat tercapai dengan tepat atau bahkan lebih cepat dari yang ditentukan, begitu pula sebaliknya.

4. Tercapainya Tujuan

Suatu program tentu dibuat dengan adanya tujuan yang hendak dicapai, bagaimana proses saat berjalannya suatu kegiatan itu dapat berjalan atau adanya kendala sehingga bisa

menjadi penyebab kegagalan dalam mencapai tujuan yang hendak dituju. Sehingga dalam hal diharapkan dapat memahami berbagai situasi dalam proses pencapaian tujuan agar tujuan dapat berjalan dengan sesuai dan dapat dirasakan hasilnya.

5. Perubahan Nyata

Sejauh mana program memiliki dampak atau hasil pada peserta atau masyarakat Untuk itu, baik dari tujuan kegiatan atau rencana atau pelaku kegiatan itu sendiri, ada perbedaan atau pengaruh, atau perubahan yang dirasakan dapat dirasakan.

4.2 Indikator Kinerja

Kinerja meliputi indikator prestasi kerja yang harus dipenuhi oleh masing-masing unit kerja dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah untuk mencapai pelayanan yang efektif sesuai standar pelayanan

pemerintah daerah kepada masyarakat Indikator kinerja adalah alat untuk mengukur kinerja (kuantitatif atau kualitatif) terhadap tujuan dan sasaran pemerintah kabupaten. Gunakan indikator ini sebagai dasar penilaian tingkat kinerja untuk menentukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Informasi yang dikomunikasikan dengan benar oleh otoritas lokal sesuai dengan indikator kinerja yang baik dan menggambarkan kinerja suatu lembaga. Penyampaian informasi yang didukung oleh sistem pengolahan data dapat membantu instansi daerah mengukur kinerja dan beberapa hasil yang dicapai selama periode tersebut.

Key Performance Indicators (KPIs) adalah indikator yang menjadi penilaian pemerintah daerah menurut Permendagri No. 5 Permendagri No 73 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Penilaian Pemerintah Daerah Untuk Mengukur Kinerja dan Akuntabilitas Pemerintah. DPU Kota Semarang menetapkan indikator ini untuk satuan kerja perangkat daerah dengan melakukan penilaian kinerja seperti capaian, permasalahan, dan isu strategis Akuntabilitas instansi pemerintah merupakan alat akuntabilitas pemerintah, meliputi laporan kinerja, mekanisme kinerja, dan penilaian berbasis kinerja secara keseluruhan atas tugas dan kewajiban pemerintah.

Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang ditetapkan sebagai indikator untuk mengukur kinerja terhadap visi dan misinya, khususnya mengukur keberhasilan pembangunan dalam hal pelaksanaan isu-isu wajib di bidang pekerjaan umum dan pengembangan lahan Kota Semarang

4.2.1 Critical Success Factor (CSF)

Critical Success Factor Suatu tujuan yang harus dicapai oleh suatu organisasi atau tim untuk menentukan keberhasilan Faktor ini merupakan bagian dari indikator kinerja sasaran strategis untuk mencapai aspek visi dan misi yang telah dirumuskan dan dicapai

Pendekatan CSF ini diciptakan oleh D Ronald Daniel pada tahun 1961 dalam bukunya “Managing the Information Crisis” yang membahas tentang penskalaan, cakupan populasi, peningkatan hubungan pelanggan untuk mencapai tujuan bisnis. . Sasaran strategis

dari implementasi sistem SIPD dapat dilihat dari perspektif sumber daya manusia, prosedur dan sistem, dll, sebagai bagian utama dari badan eksekutif. Program adalah rangkaian program untuk mencapai sesuatu sesuai dengan tujuannya.

Aspek prosedural menentukan pengetahuan seseorang berupa rangkaian langkah-langkah yang harus diikuti, yang meliputi keahlian dalam algoritma, teknik dan metode yang dipelajari bersama sebagai suatu prosedur (Suwanto, 2010: 80). Selama menggunakan aplikasi SIPD di Kota Semarang, peneliti menggunakan prosedur tertentu yang terdapat dalam manual untuk menggunakan dan mengelola aplikasi tersebut

4.3 Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)

4.3.1 Sistem Informasi

Perpaduan antara teknologi informasi dan aktivitas manusia yang menggunakan teknologi ini untuk mendukung operasi dan manajemen merupakan gagasan dari sistem informasi. Istilah sistem informasi dalam arti luas sering digunakan untuk merujuk pada interaksi antara manusia, proses algoritmik, data, dan teknologi Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi

Sistem informasi terdiri dari data yang diproses dalam bentuk yang berguna bagi penggunanya. Data yang diproses saja tidak cukup untuk memenuhi syarat sebagai informasi Hak pribadi, hak sementara dan hak nilai adalah tiga pilar yang harus didukung agar informasi yang dihasilkan

bermanfaat. Apa pun selain tiga pilar ini tidak dapat dianggap sebagai informasi yang berguna, itu adalah sampah.

Sistem informasi menurut Gordon B Davis (1991:91) adalah sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi, dan menghasilkan hasil. Sistem informasi pemerintah secara umum didefinisikan sebagai sekumpulan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak beserta para pelakunya yang bekerja dalam proses yang berurutan dan saling mendukung dalam mengolah data untuk menghasilkan informasi berupa produk (Nataniel & Hatta, 2009) Sementara itu, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memiliki arti sistem manajemen informasi berbasis kinerja, sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas tim pemerintah daerah dalam menjalankan tujuan organisasi dalam kinerja pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. masyarakat (KAUR, 2008).

4.3.2 Pengertian SIPD

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yaitu sistem yang mencatat, mengelola dan mengelola data pembangunan daerah menjadi informasi yang dapat disajikan kepada publik untuk pengambilan keputusan. Tujuan pengelolaan SIPD, menurut Perpres No. 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan informasi pemerintah daerah (informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah) serta mampu menyediakan dan mengelola pengelolaan informasi daerah agar mengelola informasi pemerintah daerah lainnya secara profesional dan

optimal.

Di era globalisasi, perkembangan teknologi informasi sangat pesat, dan integrasi telekomunikasi dan komputasi menyebabkan perubahan di bidang sistem informasi. Penggunaan sistem informasi pemerintah daerah berdasarkan Permendagri No 70 Tahun 2019 meliputi sistem perencanaan pembangunan, sistem keuangan, sistem pemerintahan daerah dan sistem pembinaan dan pengawasan masyarakat daerah. Kementerian Dalam Negeri mengimplementasikan SIPD untuk memfasilitasi pelaksanaan perencanaan, pembuatan data dan penganggaran melalui sistem aplikasi yang terintegrasi.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sangat diperlukan dalam proses pembangunan daerah untuk mendukung transparansi kepada publik melalui penggunaan sistem informasi manajemen yang akurat. SIPD merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Indikator seperti kelengkapan, pemutakhiran, keakuratan dan validasi data merupakan komponen terpenting dari proses pengumpulan dan pemasukan data yang selanjutnya akan diolah untuk menghasilkan data SIPD hasil Aplikasi analisis dalam program (sipd.kemendagri.go.id). Untuk itu, diterbitkanlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur jenis SIPD yang dapat dikembangkan. Pemerintah Daerah menjadi beberapkelompok sebagai berikut :

1. Informasi Pembangunan Daerah

Sistem informasi pemerintah daerah dapat mengelola data dan

informasi terkait perencanaan pembangunan daerah, dengan melibatkan berbagai unsur yang relevan. SIPD juga dapat berkontribusi dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD dan RENJA PD untuk memudahkan analisis dan gambaran pelaksanaan pembangunan daerah serta dapat menjadi dasar pemutakhiran data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Informasi seperti potensi sumberdaya, keuangan ekonomi daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah masuk dalam perencanaan pembangunan daerah.

2. Informasi Keuangan Daerah

Sistem informasi pemerintah daerah memungkinkan pengelolaan data keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien melalui berbagai elemen yang relevan, dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Proses pengelolaan keuangan daerah yang relevan meliputi:

- A. perencanaan anggaran daerah
- B. Pelaksanaan dan pengelolaan dana daerah
- C. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- D. Sistem akuntabilitas daerah untuk pelaksanaan anggaran

3. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya

SIPD dapat memberikan informasi terkait peraturan umum lainnya. Informasi umum tersebut dapat berupa Laporan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), PERDA dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai unsur terkait Hasil output

yang terdapat pada aplikasi SIPD, diantara lain :

1. Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD).

Surat Penawaran Pendanaan adalah dokumen yang menunjukkan bahwa dana tersedia untuk melakukan suatu kegiatan dan menjadi dasar untuk permintaan pembayaran (SPP)

2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

Surat Permintaan Pembayaran adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran yang diterbitkan oleh pelaksana kegiatan/dana produksi.

3. Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

Surat perintah pembayaran adalah dokumen yang digunakan/dikeluarkan oleh pengguna anggaran/agen pengguna anggaran untuk menerbitkan surat perintah pembayaran dana atas beban penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah

4. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Surat Perintah Pencairan Dana adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.

5. Penerbitan Surat Pertanggungjawaban.

Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib melaporkan kepada Kepala PPKD-SKPD atas penggunaan anggaran Belanja Langsung dalam waktu sepuluh bulan berikutnya.

6. Pengajuan Nota Pencairan Dana (NPD).

Nota pencairan dana adalah alat yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pembantu Pengeluaran untuk mencairkan dana. Dalam mekanisme ini tidak ada surat tanggung jawab, hanya ada invoice atau kwitansi sebagai bukti tanggung jawab.



Gambar 4. 1 Tampilan Aplikasi SIPD

4.3.3 Tujuan Dan Manfaat SIPD

1. Tujuan SIPD

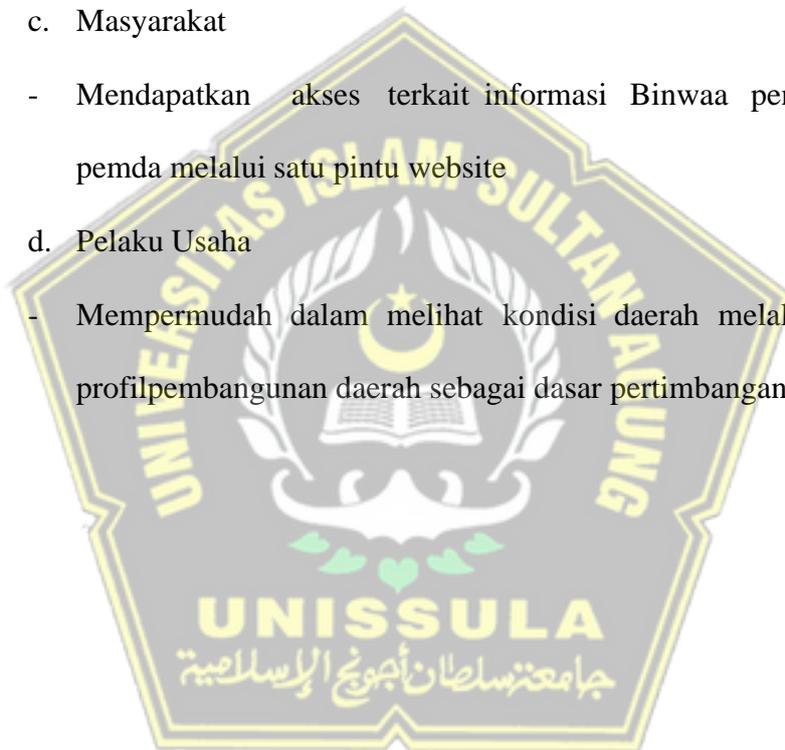
- Menginformasikan kepada masyarakat tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah
- Mewujudkan layanan informasi pemerintah daerah yang elektronik dan terintegrasi
- Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

2. Kegunaan SIPD

a. Bagi Dinas Terkait

- Tersedianya informasi pemerintah
- Bahan pertimbangan pemerintah kebijakan nasional

- Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Binwa
- b. Bagi Pemerintah Daerah
 - Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan penyelenggaraan Pemdamelalui daerah sistem informasi yang saling terhubung
 - Mempermudah penyampaian pertimbangan informasi dari antar tingkatan perumusan
- c. Masyarakat
 - Mendapatkan akses terkait informasi Binwaa penyelenggaraan pemda melalui satu pintu website
- d. Pelaku Usaha
 - Mempermudah dalam melihat kondisi daerah melaluianalisis dan profil pembangunan daerah sebagai dasar pertimbangan investas



BAB V

METODA PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA

5.1 Metoda Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data program magang ini menggunakan metode observasi yaitu mengamati secara langsung teknologi mata pelajaran yang diteliti, dan tujuannya adalah untuk memperoleh data dan data wawancara untuk mendukung pertanyaan. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mencatat apa yang mereka lihat selama penelitian (Gulo, 2002).

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati kegiatan yang terjadi pada DPU Kota Semarang serta data dari infoman yang dapat memberi informasi secara lengkap dan bertanggung jawab dalam menangani aplikasi SIPD. Observasi, wawancara dan penyebaran kuesioner yang dilakukan terhadap Bapak Priyono, SE selaku pegawai yang memiliki jabatan sebagai bendahara umum sekretariat serta beberapa staff keuangan pada pegawai Pekerjaan Umum Kota Semarang. Pengambilan sumber data menggunakan teknik tersebut yang dilakukan diharapkan dapat menunjang data menjadi relevan dengan topik penelitian dengan mengamati efektivitas penggunaan aplikasi SIPD.

Lokasi dalam kajian penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Berdasarkan pertimbangan

atas data yang diperlukan dan adanya masalah yang sesuai dengan judul penelitian.

5.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam analisis kuantitatif deskriptif dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari metode pengamatan langsung pada lapangan, wawancara dan penyebaran kuesioner pada informan. Sumber informasi pada penelitian ini adalah staf pegawai pengguna SIPD di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan dengan proses tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi secara langsung. Lalu untuk kuesioner yaitu mengajukan beberapa pertanyaan secara tulis dan diisi sendiri oleh informan yang terkait.

Lokasi dalam kajian penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Berdasarkan pertimbangan atas data yang diperlukan dan adanya masalah yang sesuai dengan judul penelitian.

5.3 Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penulisan business case report ini adalah secara deskriptif kuantitatif dengan penulis menggunakan instrument ini secara terus menerus.

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penulisan business case report ini adalah menggunakan:

- 1) Analisis Deskriptif

Sugiyono (2012: 13) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Menurut Sudjana dan Ibrahim (2004:64) penelitian deskriptif adalah “penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang”.

2) Analisis Kuantitatif

Arikunto (2013:12) menjelaskan pendekatan kuantitatif yaitu menggunakan metode kuantitatif karena menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, interpretasi data, dan penampilan hasil. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena menggunakan angka, rekapan data dan penyajian hasil. Pendekatan ini juga terkait dengan pencarian variabel yang berfokus pada isu dan fenomena terkini berupa hasil pencarian dalam bentuk numerik yang bermakna.

Sumber data dalam analisis kuantitatif deskriptif dalam penelitian ini menggunakan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari metode pengamatan langsung pada lapangan, wawancara dan penyebaran kuesioner pada informan. Sumber informasi pada penelitian ini adalah staf pegawai pengguna SIPD di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara yaitu mengajukan

beberapa pertanyaan kepada informan dengan proses tanya jawab secara lisan untuk mendapatkan informasi secara langsung. Lalu untuk kuesioner yaitu mengajukan beberapa pertanyaan secara tulis dan di isi sendiri oleh informan yang terkait.



BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan serangkaian implementasi dan hasil penelitian. Meliputi analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh dari penelitian dan pembahasan hasil.

6.1 Deskripsi Karakteristik Responden

Objek penelitian ini merupakan lingkup dari Kantor DPU Kota Semarang, subjek penelitian meliputi pekerja di kantor DPU Kota Semarang berjumlah 30 orang. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data kuisisioner, responden secara langsung menerima dan memperoleh data karakteristik responden, seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. 1 Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentasi
1	Laki-lakii	11	36,67%
2	Perempuan	19	63,33%

Sumber : Data Primer yang di olah, 2023

Berdasarkan tabel 6.1 diatas diketahui bahwa jumlah responden sebanyak 30 orang yang terdiri dari 11 orang dengan jenis kelamin laki-laki atau 36,67% dan 19 orang dengan jenis kelamin perempuan atau 63,33%. Maka dapat disimpulkan DPU Kota Semarang didominasi oleh perempuan.

Tabel 6. 2 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia

No	Keterangan	Frekuensi	Presentasi
1	25-30	1	3,33%
2	30-35	5	16,67%
3	35-40	10	33,33%
4	40-45	4	13,33%
5	45-50	5	16,67%
6	>50	5	16,67%
TOTAL		30	100%

Sumber : Data Primer yang di olah, 2023

Berdasarkan tabel 6.2 data yang diperoleh pada usia 25-30 tahun berjumlah 1 orang (3,33%), pada kelompok usia 30-35 tahun berjumlah 5 orang (16,67%). Responden usia 35-40 tahun berjumlah 10 orang (33,33%), pada usia 40-45 tahun berjumlah 4 orang (13,13%), usia 45-50 tahun berjumlah 5 orang (16,67%) dan usia >50 tahun berjumlah 5 orang (16,67%). Maka simpulan yang didapat kelompok usia responden didominasi pada usia 35-40 tahun.

Demografi responden diperoleh berdasarkan klasifikasi Pendidikan terakhir yang dapat dilihat pada tabel 6.3 berikut

Tabel 6. 3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Keterangan	Frekuensi	Presentasi
1	Diploma Tiga (D3)	11	36,67%

2	Strata Satu (S1)	14	46,67%
3	Strata Dua (S2)	5	16,67%
TOTAL		30	100%

Sumber : Data Primer yang di olah, 2023

Berdasarkan tabel 6.3 responden dengan Pendidikan terakhir diploma tiga (D3) berjumlah 11 orang (39,67%), selanjutnya pada kelompok Pendidikan strata satu (S1) berjumlah 14 orang (46,67%) dan Pendidikan terakhir yang ditempuh responden pada strata dua (S2) berjumlah 5 orang (16,67%), maka simpulan yang didapat responden pegawai DPU Kota Semarang dengan klasifikasi Pendidikan terakhir didominasi oleh Pendidikan strata satu (S1) berjumlah 14 orang.

Tabel 6. 4 Klasifikasi Responden Berdasarkan Lama Kerja

No	Lama Kerja	Frekuensi	Presentasi
1	<5 Tahun	7	23,33%
2	(5-10) Tahun	5	16,67%
3	>10 Tahun	18	60,00%
TOTAL		30	100%

Sumber : Data Primer yang di olah, 2023

Berdasarkan tabel 6.4 responden yang telah bekerja selama <5 tahun

berjumlah 7 orang (23,33%), responden lain dengan lama kerja (5-10) tahun berjumlah 5 orang (16,67%) dan lama kerja >10 tahun berjumlah 18 orang dengan persentasi 60.00%. Maka simpulan data dari lama kerja responden di DPU Kota Semarang didominasi oleh senior yang lebih dari 10 tahun lama kerja.

6.2 Analisis Data

6.2.1 Uji Realibilitas

Uji realiabilitas merupakan uji untuk menunjukkan konsistensi dari jawaban apabila dilakukan uji secara berulang. Dinyatakan reliabel apabila jawaban responden menjawab stabil dan konsisten. Penelitian ini menggunakan ukuran nilai Cronbach's Alpha, dan suatu nilai dinyatakan reliabel jika lebih besar dari 0,6. Data uji reliabilitas berikut ditunjukkan pada Tabel 6.5.

Tabel 6. 5 Hasil Uji Realibilitas

No	Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Keterangan
1	Kualitas sistem	0,956	Reliabel
2	Kualitas informasi	0,966	Reliabel
3	Penggunaan	0,761	Reliabel
4	Kepuasan	0,945	Reliabel
5	Dampak Individu	0,864	Reliabel

6	Dampak Organisasi	0,955	Reliabel
---	-------------------	-------	----------

Sumber : Data Primer yang di olah, 2023

Berdasarkan tabel 6.5 hasil uji realibilitas, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dalam kategori reliabel karena nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,6.

6.2.2 Uji Statistik Deskriptif

Tabel 6. 6 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Kisaran Teoritis			Kisaran Aktual			Std. Deviasi
		Min	Max	Mean	Min	Max	Mean	
Kualitas sistem	30	8	40	25	19	35	26.13	3.919
Kualitas informasi	30	10	50	25	23	50	40.90	7.480
Penggunaan	30	3	15	10	10	15	12.70	1.784
Kepuasan	30	4	20	15	10	18	13.63	1.866
Dampak Individu	30	6	30	10	8	14	11,37	1,741
Dampak organisasi	30	5	15	10	11	15	13.07	1.337

Sumber : Data Primer yang di olah, 2023

Berdasarkan Tabel 6.6 Kisaran teoritis merupakan perkiraan nilai kisaran minimum dan maksimum total skor jawaban dari setiap variabel. Kisaran aktual merupakan nilai maksimum dan minimum dari total skor

jawaban aktual yang diperoleh setelah dilakukan analisis deskriptif. Dari data yang diperoleh terlihat bahwa variable kualitas system memiliki nilai 30 dengan minimalnya adalah 8 dan maksimalnya adalah 40, maka dari perhitungan didapatkan hasil akhir dari standar deviasinya adalah 3,919. Pada variable kualitas informasi memiliki nilai 30 dengan minimalnya adalah 10 dan maksimalnya adalah 50, maka dari perhitungan didapatkan hasil akhir dari system informasinya adalah 7.480.

Nilai rata-rata (mean) yang tinggi pada kualitas sistem menunjukkan bahwa jumlah data sebanyak 30 dan standar deviasi sebesar 3.919. Jawaban responden menunjukkan bahwa variabel kualitas sistem memiliki kisaran teoritis antara 10-40 dengan nilai mean teoritis sebesar 25. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual, yaitu antara 19-35 dengan mean aktual sebesar 26,13. Nilai mean aktual lebih besar dari mean teoritis, menunjukkan bahwa rata-rata kualitas sistem SIPD tinggi.

Nilai rata-rata (mean) yang tinggi pada kualitas informasi menunjukkan bahwa kualitas informasi yang diberikan tinggi. Tabel di atas, dapat diketahui standar deviasi sebesar 7.480. Jawaban responden menunjukkan bahwa variabel kualitas informasi memiliki kisaran teoritis antara 10-40 dengan nilai mean teoritis sebesar 25. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual, yaitu antara 23-50, dengan mean aktual sebesar 40,90. Nilai mean aktual lebih besar dari mean teoritis, yaitu $40,90 > 25$. Sehingga, menunjukkan bahwa rata-rata kualitas informasi yang diberikan oleh DPU Kota Semarang sangat tinggi.

Nilai rata-rata (mean) pada variabel penggunaan menunjukkan nilai cukup tinggi, standar deviasi sebesar 1,784. Jawaban responden menunjukkan bahwa variabel kualitas informasi memiliki kisaran teoritis antara 5-15 dengan nilai mean teoritis sebesar 10. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual, yaitu antara 10-15, dengan mean aktual sebesar 12,70. Nilai mean aktual lebih besar dari mean teoritis, yaitu $12,70 > 10$. Sehingga, menunjukkan bahwa rata-rata variabel penggunaan termasuk cukup tinggi.

Nilai rata-rata (mean) pada variabel kepuasan Pengguna menunjukkan nilai rendah dengan standar deviasi sebesar 1.866. Jawaban responden menunjukkan bahwa variabel kepuasan ini memiliki kisaran teoritis antara 5-25 dengan nilai mean teoritis sebesar 15. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual, yaitu antara 10-18, dengan mean aktual sebesar 13,63. Nilai mean aktual lebih kecil dari mean teoritis, yaitu $13,63 < 15$. Sehingga, menunjukkan bahwa rata-rata variabel kepuasan termasuk rendah.

Nilai rata-rata (mean) pada variabel dampak individu menunjukkan nilai cukup dengan standar deviasi sebesar 1.741. Jawaban responden menunjukkan bahwa variabel kepuasan ini memiliki kisaran teoritis antara 5-15 dengan nilai mean teoritis sebesar 10. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual, yaitu antara 8-14, dengan mean aktual sebesar 11,37. Nilai mean aktual lebih besar dari mean teoritis, yaitu $11,37 < 10$. Sehingga, menunjukkan bahwa rata-rata variabel dampak Individu cukup tinggi.

Nilai rata-rata (mean) pada variabel dampak organisasi menunjukkan nilai cukup tinggi dengan standar deviasi sebesar 1.337. Jawaban responden

menunjukkan bahwa variabel kepuasan ini memiliki kisaran teoritis antara 5-15 dengan nilai mean teoritis sebesar 10. Berdasarkan jawaban responden kisaran aktual, yaitu antara 11-15, dengan mean aktual sebesar 13,07. Nilai mean aktual lebih besar dari mean teoritis, yaitu $13,07 > 10$. Sehingga, menunjukkan bahwa rata-rata variabel dampak organisasi cukup.

Selanjutnya pada variable penggunaan dengan nilai 30 dengan minimal 3 dan maksimalnya 15, maka dari perhitungan didapatkan hasil akhir dari penggunaan adalah 1.784. Pada variable kepuasan memiliki nilai 30 dengan minimal 4 dan maksimalnya 20, maka dari perhitungan didapatkan hasil akhir dari kepuasan adalah 1.866.

Kemudian pada variable dampak individu memiliki nilai 30 dengan minimal 6 dan maksimalnya 30, maka dari perhitungan didapatkan hasil akhir dari variable dampak individu adalah 1,741. Dan yang terakhir adalah variable dampak organisasi memiliki nilai 30 dengan minimal 5 dan maksimalnya 15, maka dari perhitungan didapatkan hasil akhir dari kepuasan adalah 1.337.

6.3 Pembahasan

6.3.1 Efektifitas Penggunaan Aplikasi SIPD

Aplikasi SIPD digunakan oleh pemerintah daerah (termasuk provinsi dan kabupaten/kota) untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, inovatif dan percepatan. Lihatlah jumlah sistem informasi dari segi kuantitas. Untuk analisis SIPD dapat dilihat dari output yang dihasilkan oleh SIPD (yaitu berupa DPA dan RKA). Berikut hasil wawancara terkait

gambaran proses exit yang dihasilkan oleh SIPD, yang berimplikasi bahwa proses dilakukan secara online sehingga exit dapat tercipta (Balqis & Fadhy, 2021)

Pengguna SIPD yang berpartisipasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan Kebijakan Implementasi SIPD ini akan dengan mudah memahami kualitas data Sistem Informasi Administrasi Kecamatan (DISIS). Diuji apakah proses penerbitan PerBup melalui pembuatan rangkaian rencana kerja dan anggaran (WPA) yang terlebih dahulu harus disetujui oleh Korea Utara sebelum diproses oleh masing-masing instansi untuk membuat dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), setelah itu masyarakat dan setiap unsur pemerintah bisa melihatnya. Laporan program dan anggaran baru tidak dapat dipercaya (reliable) jika tidak mengandung masalah atau kesalahan. Ini adalah sistem yang membingungkan, baik dari segi bahan maupun aplikasi. Sebagai hasil penelitian, SIPD sendiri bisa diimpor hampir di mana saja. Memang, semua data yang disajikan akan diverifikasi dalam sistem SIPD. Namun dalam penerapan SIPD, masih banyak terjadi kesalahan pada saat importasi. Tidak hanya masalah jaringan, tetapi juga kesalahan sistem yang sering membuat pengguna tidak dapat bekerja. Adanya kepuasan yang dihasilkan dari penerapan aplikasi SIPD pada Kota Semarang dapat diketahui bahwa sikap pegawai di Kota Semarang sangat menerima dalam menggunakan aplikasi baru tersebut, karena perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi menjadi lebih teratur dan terarah, namun di samping itu perlu adanya pembelajaran bagi pegawai dalam

menggunakan SIPD, agar tidak adanya keluhan yang dirasakan dalam mengoperasikannya. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi terdiri dari keuntungan berdasarkan rasio antara output dan input yang digunakan.(Deseverians & Wulandari, 2020)

Berdasarkan hasil penelitian dan teori mengenai kepuasan menunjukkan bahwa kepuasan yang dihasilkan dari adanya SIPD, berupa keuntungan yang diindikasikan dengan adanya output yakni sikap pegawai tidak perlu melakukan mobilitas lebih banyak dalam menyampaikan dokumen atau program usulan ke Bappeda Kota Semarang. Untuk aspek input yakni sikap pegawai di Kota Semarang terutama sub bagian perencanaan perlu pembelajaran dalam mengaplikasikan aplikasi SIPD.

Pada saat ini dengan berubahnya nomenklatur kegiatan lama berimbas pada kualitas dokumen perencanaan RKPD menjadi tidak selaras dengan dokumen perencanaan di atasnya yaitu RPJMD dan Renstra dikarenakan penerapan peraturan tersebut adalah tahun pertama pelaksanaannya yang membuat daerah harus merevisi atau melakukan perubahan pada dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini sangat berpengaruh terhadap capaian dari visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan serta memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pembangunan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, seperti pendidikan dan Kesehatan.(Ekasaputra, 2021)

Kualitas dokumen perencanaan konsisten karena semua kegiatan yang dilakukan oleh badan daerah sepanjang tahun, yaitu RKPD, sejalan dan mendukung rencana RPJMD dan Renstra badan daerah yang ada, karena program dan kegiatan telah ditutup dengan peraturan baru dan daerah tidak dapat lagi menyerupai usulan proyek atau kegiatan di luar judul yang sudah ada dalam Permendagri No. 90 Tahun 2019 sebelum peraturan tersebut diterapkan karena tahun-tahun sebelumnya membuat proses perencanaan tidak konsisten secara bertahap.

Setelah menggunakan SIPD, Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memiliki data yang lebih baik Hasil dari berbagai variabel mengkonfirmasi hal ini. Selama pelaksanaan SIPD, setiap pegawai yang bertanggung jawab untuk melaporkan program dan anggaran termotivasi untuk melakukannya karena telah ditetapkan tenggat waktu dalam proses informasi pelaporan. Lebih awal untuk online, jadi program ini sangat membantu kami untuk menyelesaikan tugas. Jika direvisi pada 2019, Peraturan Bupati tahun anggaran 2019 kemungkinan akan terbit di awal tahun Namun, setelah penerapan SIPD pada tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten (PerBup) tahun anggaran 2021 diterbitkan mulai Januari. Maka Hipotesis yang menyatakan bahwa, “Penggunaan aplikasi SIPD di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sangat Efektif” Diterima dan Hipotesis yang menyatakan bahwa “Penggunaan aplikasi SIPD di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tidak efektif ditolak”.

Hasil penelitian yang telah dilakukan sejalan terhadap penelitian yang

di laksanakan Dian S. Manoe, (2023) yang menyebutkan bahwa mekanisme dan prosedur SIPD yang diterapkan dan dioperasionalkan di daerah dinilai Efektif dilaksanakan.

Hasil penelitian yang telah dilakukan tidak sejalan terhadap penelitian yang di laksanakan Chinda Aqhni Adisi, (2022) yang menyebutkan bahwa mekanisme dan prosedur SIPD yang diterapkan belum efektif. Sumber daya manusia yang belum dapat dikatakan baik, masih terjadi error, jaringan saat penggunaan SIPD sehingga menghambat dalam penginputan. Sehingga masih harus menggunakan SIMAKDA sebagai aplikasi pendamping.

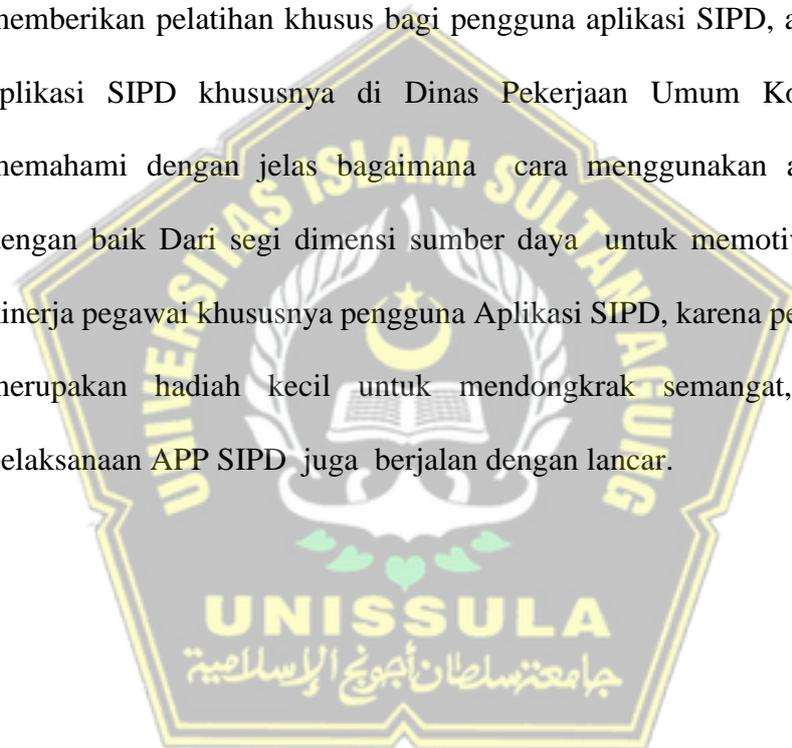
6.3.2 Upaya Dalam Mengatasi Hambatan

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi setelah di terapkannya aplikasi SIPD di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah :

(1) Meninjau lebih lanjut aplikasi dan meneliti sedemikian rupa agar tidak terjadi kesalahan sistem atau perangkat yang terhubung. (2) Sumber Daya yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang menunjukkan bahwa sudah sangat mendukung dalam pengimplementasian ini, walaupun tidak ada kesesuaian Tupoksi yang terjalin dari proses penginputan dari perencanaan hingga penatausahaan keuangan; (3) Hasil riset terkait Disposisi untuk pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang masih terjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan; (4) Ternyata dalam implementasi aplikasi SIPD justru ditemukan kendala berupa waktu dalam implementasi aplikasi SIPD. Disebabkan proses pelaksanaan yang dilakukan

secara online dan telah diberikan rentang waktu penginputan, serta dalam waktu implementasi kebijakan Pemkab Kota Semarang hanya memberikan sosialisasi dalam penggunaan SIPD. Sehingga memunculkan ketidakpahaman bagi pengguna SIPD.

Jadi. Penulis menyarankan agar pemerintah tidak hanya mensosialisasikan kepada pengguna SIPD saja. Namun, pihaknya juga memberikan pelatihan khusus bagi pengguna aplikasi SIPD, agar pengguna aplikasi SIPD khususnya di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang memahami dengan jelas bagaimana cara menggunakan aplikasi SIPD dengan baik. Dari segi dimensi sumber daya untuk memotivasi semangat kinerja pegawai khususnya pengguna Aplikasi SIPD, karena penghargaan ini merupakan hadiah kecil untuk mendorong semangat, saya harap pelaksanaan APP SIPD juga berjalan dengan lancar.



BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang efektivitas penggunaan aplikasi sistem informasi pemerintah daerah di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi SIPD di pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota adalah untuk manajemen pemerintahan yang lebih berkualitas, inovatif dan cepat Sebagai hasil penelitian, SIPD sendiri bisa diimpor hampir di mana saja. Tidak hanya masalah jaringan, tetapi juga kesalahan sistem yang sering membuat pengguna tidak dapat bekerja. Namun di luar itu, pegawai harus belajar bagaimana menggunakan aplikasi SIPD.

Maka Hipotesis yang menyatakan bahwa, «Penggunaan aplikasi SIPD di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang sangat Efektif» Diterima dan Hipotesis yang menyatakan bahwa «Penggunaan aplikasi SIPD di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Tidak efektif ditolak».

7.2 Rekomendasi

Upaya dalam mengatasi hambatan terhadap permasalahan yang didapat bahwa pemerintah daerah dapat meninjau lebih lanjut aplikasi dan meneliti sedemikian rupa agar tidak terjadi kesalahan sistem atau perangkat yang terhubung. Penulis menyarankan agar sebaiknya pemerintah tidak hanya sekedar melakukan sosialisasi bagi pengguna SIPD.

BAB VIII

REFLEKSI DIRI

8.1 Hal Positif dari Perkuliahan yang Bermanfaat terhadap Pekerjaan Selama Magang

Didalam dunia kerja seperti magang ini di Dinas Pekerjaan Umum, membantu saya menerapkan ilmu akuntansi yang saya pelajari selama perkuliahan dengan praktik langsung, seperti sistem, prosedur, alur dan teknologi akuntansi. (perlu ditingkatkan).

Pendidikan karakter yang saya dapat di UNISSULA Semarang yaitu penerapan nilai BudAI (Budaya Agama Islam) menjadi alasan saya dapat berkomunikasi dengan baik serta sopan santun terhadap karyawan dalam perusahaan.

Salah satu mata kuliah yang berkaitan dengan kegiatan magang yang dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang adalah *Critical Thinking and Problem Solving*. Penulis terlibat secara langsung dalam permasalahan pekerjaan agar bisa meningkatkan serta mengasah skill dan kemampuan untuk *problem solving*

8.2 Manfaat Magang terhadap Pengembangan Soft Skill Mahasiswa

Selama kegiatan magang memberikan banyak pengembangan pada soft skill saya. Contohnya adalah

- Meningkatkan pengetahuan dalam kerja baik dalam hal keilmuan maupun pengalaman kerja.

- Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan orang-orang yang berada satu perusahaan dengan kita.
- Memacu motivasi mahasiswa untuk menjadi tenaga kerja yang siap kerja dan menerapkan materi yang pernah dipelajari kedalam dunia pekerjaan.

8.3 Manfaat Magang terhadap Pengembangan Kemampuan Kognitif Mahasiswa

Kegiatan magang mampu mengembangkan kemampuan kognitif saya. Salah satunya adalah meningkatkan pengetahuan standar operasional kerja dalam perusahaan dan cara mengaplikasikanya dengan baik. Selain itu juga kegiatan magang mengajarkan saya untuk dapat berpikir secara luas, yang mana diajarkan dalam memandang suatu hal studi kasus dari beberapa sudut pandang sehingga dapat menghasilkan pemikiran yang luas.

Selain itu saya belajar untuk memperlihatkan dan fokus proses magang. Jika sebelumnya, Ketika perkuliahan saya sering tidak fokus dengan apa yang sedang dibahas, dikarenakan akibat yang diterimahnya ditanggung oleh saya sendiri. Sedangkan dalam proses magang, saya berusaha untuk fokus. Karena Ketika ada kesalahan dari saya, maka Dinas Pekarjaan Umum Kota Semarang yang akan dirugikan.

8.4 Kunci Sukses Bekerja Berdasarkan Pengalaman Magang

- Rajin, jujur, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan amanah
- Berani memulai dari nol dan siap menanggung resiko

- Modal kemampuan dalam keilmuan serta ketrampilan yang mendukung seperti komunikasi, bahasa asing, dan lain-lain.

8.5 Rencana Pengembangan Diri, Karir, dan Pendidikan Mahasiswa

Selain ilmu pengetahuan maka saya akan belajar bahasa Inggris, belajar desain, belajar komunikasi dan berbicara didepan agar menjadi nilai lebih, selain itu saya akan belajar memperdalam ilmu agama islam tetap berkarir tapi tidak melupakan nilai-nilai islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah, F. (2021). Penerapan Metode Analisa Critical Success Factor Pada Sistem Penjualan dan Persediaan Barang. *Journal Sensi* Vol.7 No.1. ISSN:2461-1409
- Ashari, E. (2010). Reformasi Pengelolaan SDM Aparatur, Prasyarat Tata Kelola Birokrasi Yang Baik
- Ekaputra, N. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Otonomi* Vol. 21 Nomor 1.
- Gary Dessler. (1997). *Human Resource Management*, ed. Ke 7. terj. Benyamin, (Prentice Hall, Inc., New Jersey,). hlm. 263
- Gulo, W. (2002). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Kuswahyu, L., Djoko Harmantyo, D. R., & Harmantyo, M. S. D. (2010). Relational Logic Database Design Model of Information System Control Project in Pt. istaka Karya. *Jurnal Sistem Informasi STMIK Jakarta STI&K*, 140946
- Mariana, N. (2006). Pengukur-Pengukur Kesuksesan Sistem Informasi Eksekutif. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK* Volume XI, No. 1.
- Miles, Mathew B. & Michael Huberman. (2009). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- O'Brien, JA . Marakas, george. (2009). *Management Information System*.
Nedition. Mc Graw Hill. Inc Boston
- Octomo, Budi Sutedjo Dharma. (2002). *Perencanaan Dan Pembangunan Sistem Informasi*. Penerbit : Andi Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2009
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun

2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Sandiasa, G., & Agustana, P. (2017). Reformasi Administrasi dan Birokrasi Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Layanan Publik di Daerah. *Warmadewa* .

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No. 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang

Winarno Surakhmad. (1986). Pengantar Interaksi Mengajar Belajar Dasar dan Teknik Metodologi Pengajaran. Bandung: Tarsito

